

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU **NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN **KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. bahwa perlu dilakukan penambahan ketentuan terkai tertib sosial pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk peraturandaerah tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 04 tahun 2016 ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 - Tahun 3. Undang-Undang Nomor 21 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2036).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diatur. pengaturan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun setelah diberlakukan dan diterapkan masih belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh belum diaturnya ketentuan terkait tertib social sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 29 A
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal II Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 215

Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR

04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAM

KETERTIBAN UMUM

Pasal I

Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 A

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku/berbuat asusila di jalan, jalur hijau,taman dan/atau tempat-tempatumum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerjaan seks komersial;
 - b. menyuruh,memfasilitasi,membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial; dan
 - d. menyediakan tempat yang digunakan bertindak mesum/asusila dalam bentuk apapun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuianya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

> Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2017 NOMOR 168

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 22,147/2017

REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 22/HUK/2017